

DANA HIBAH KONI DAN PKK DIDUGA BERMASALAH, SEKDA DOMPU: TEMUAN BPK SUDAH DITINDAKLANJUTI

Klipping Berita



TEMUAN BPK: Dana hibah KONI Dompu tahun 2023 menjadi temuan BPK. Begitu juga dengan dana hibah PKK. (ISTIMEWA/LOMBOK POST)

LombokPost-Dana hibah KONI dan PKK Dompu diduga bermasalah. BPK NTB menemukan adanya penerimaan dana hibah KONI lebih dari satu kali di tahun 2023.

Dana hibah untuk KONI Dompu yang saat itu dipimpin Bupati Dompu Abdul Kader Jaelani dicairkan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora).

KONI melakukan pencairan lebih dari satu tahap tanpa menyertakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) untuk pencairan tahap selanjutnya. Alasan dari KONI belum menyampaikan LPJ tahap satu untuk pencairan dana hibah tahap dua,

menurut BPK, karena dana hibah di tahap satu masih belum habis.

Kendati demikian, Dikbudpora tetap mencairkan tahap selanjutnya kepada KONI dengan mengatakan LPJ dibuat sekaligus menjadi satu setelah pencairan terakhir diterima.

”Anggaran hibah KONI yang belum disampaikan LPJ untuk pencairan tahap selanjutnya Rp 5.681.560.000,” demikian bunyi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK NTB atas LKPD Dompu tahun 2023 yang diperoleh Lombok Post. Dari hasil penelusuran auditor, ternyata Dikbudpora tidak mempunyai tim evaluasi permohonan hibah.

Selama ini evaluasi hanya dilakukan oleh pimpinan atau tim dari keuangan.

Evaluasi hanya dilakukan dengan memastikan ketersediaan anggaran dan kelengkapan administrasi pemohon.

Tidak ada tim evaluasi khusus yang ditetapkan dalam SK untuk melakukan evaluasi setiap usulan permohonan hibah sebelum menetapkan penerima hibah.

”Evaluasi dilaksanakan guna menilai usulan tertulis pemohon pada program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan,” sebut BPK.

Di sisi lain, BPK juga menemukan bahwa penerima hibah tanpa proses evaluasi senilai Rp 3 miliar lebih.

Salah satunya dana hibah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk PKK Rp 1 miliar.

Diketahui, PKK adalah organisasi yang dipimpin Lilis Suryani, istri Bupati Dompu Kader Jaelani.

Pengujian lebih lanjut oleh BPK, diketahui bahwa SKPD terkait tidak mempunyai kriteria khusus yang ditetapkan sebagai syarat penerima hibah, tidak ada mekanisme evaluasi yang dibuat.

Dalam rekomendasinya, BPK meminta Bupati Dompu agar penyaluran dana hibah didukung dengan proposal yang memadai dan memperhatikan ketertiban penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Sekda Dompu Gatot Gunawan mengatakan telah menindaklanjuti temuan BPK tersebut.

”Temuan BPK sudah ditindaklanjuti oleh inspektorat ke OPD (organisasi perangkat daerah) yang menjadi lokus LHP BPK itu,” ungkapnya. (jlo/r8)